



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Seliabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: M. ZAENAL ARIFIN
NIK	: 3506251111630002
Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	: PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
Sub Unit Kerja	: PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
Jabatan	: HAKIM TINGGI
Jenis Laporan	: Periodik - 2025
Tanggal Kirim	: 6 Januari 2026

Catatan:
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-06 13:15:10



Edit

Anotasi

Isi &
Tanda ...Konve
rsi

Semua



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ZAENAL ARIFIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 60507

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.970.000.000

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/154 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 1.270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 184.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 351.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.572.050.000

III. HUTANG Rp. 598.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.974.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.